

Prospek CPO Usai Dihantam Kebijakan India

Tanggal : Kamis , 04 Februari 2021
Media : Bisnis Indonesia
Halaman : 18
Wartawan : Asteria Desi Kartika Sari
Muatan Berita : Netral
Narasumber : None ()
Rubrik : Investasi
Topik : CPO



Kebijakan terbaru India terkait dengan importasi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) membuat komoditas tersebut mengalami tekanan yang berarti di sisi harga.

Asteria Desi Kartika Sari
asteria.desi@bisnis.com

Komoditas minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) terpaksa harus mengalami tekanan kembali setelah mengawali pekan ini dengan kenaikan harga.

Seperti diketahui, harga komoditas CPO Malaysia untuk kontrak aktif diperjualbelikan, mengalami kenaikan pada perdagangan awal pekan ini, Senin (1/2). Harga kontrak pengiriman April di Bursa Malaysia Derivatif mengalami kenaikan hampir 3%. Harga CPO menguat ke level 3.489 ringgit Malaysia per ton pada hari itu.

Namun, pada Rabu (3/2), harga komoditas andalan ekspor Indonesia itu harus kembali turun lebih dari 3%. Bursa Malaysia Derivatif melaporkan harga CPO untuk kontrak 3 bulan ke depan terkoreksi 3,13% ke 3.285 ringgit Malaysia per ton.

Kebijakan perpajakan baru dari India menjadi salah satu biang keladinya. Negeri Bollywood tersebut memberlakukan pajak tambahan atas impor CPO. Hal itu dilakukan lantaran negara importir minyak nabati terbesar di dunia tersebut mencoba membangun infrastruktur pertanian dalam negeri dengan mengenakan pajak impor.

Seperti dilansir dari *The Stars Online*, Selasa (2/2), Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah setempat memang memotong bea masuk impor minyak sawit mentah menjadi 15% dari 27,5%.

Namun, pada saat yang sama, memberlakukan pajak tambahan yang dikenakan secara terpisah sebesar 17,5%.

"Ini adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur pertanian," kata Sitharaman.

Alhasil, kebijakan perpajakan

India itu akan mempersempit *gap* bea masuk antara minyak sawit dan minyak nabati lainnya. Dengan demikian, besar kemungkinan, kebijakan itu dapat mengurangi impor minyak sawit India dan berpotensi menekan harga minyak sawit dari negara eksportir seperti Malaysia dan Indonesia.

Adanya perubahan kebijakan itu, akan membuat impor minyak sawit mentah akan secara efektif dikenakan pajak dengan total sebesar 35,75% dibandingkan dengan sebelumnya 30,25%.

Sebelumnya, CPO mengawali 2021 dengan performa yang kurang meyakinkan. Pasalnya, selama Januari 2021, harga komoditas tersebut terkoreksi. Sebelumnya, harga CPO untuk pengiriman Maret 2021 berada di zona merah dengan koreksi 2,72% ke level 3.356 ringgit per ton.

Analisis Capital Futures Wahyu Laksono memperkirakan pelemahan CPO masih dapat berlanjut meskipun terbatas. Selanjutnya, *rebound* harga CPO masih cukup terbuka dalam waktu dekat. Penguatan ini akan terjadi lebih cepat apabila sentimen dari pasar global membaik dan memicu pelemahan dolar AS yang menjadi lawan komoditas.

Dalam jangka pendek, kemungkinan pergerakan harga CPO di level 3.000 hingga 3.600 ringgit per ton pada kuartal pertama antara 2.500 per ton hingga 4.000 ringgit per ton," katanya.

Faktor penopang peluang kenaikan harga CPO salah satunya adalah ancaman penurunan panen akibat fenomena perubahan iklim La Nina yang melanda kawasan tropis Pasifik.

Dia menurukan hambatan tersebut akan membuat aktivitas panen menjadi terganggu dan merusak



Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman.

“Ini adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur pertanian.

stok sawit yang ada. Selain itu, frekuensi hujan yang akan lebih tinggi berpotensi minyak kelapa sawit dan menyebabkan kenaikan harga CPO.

Menurutnya, penurunan harga CPO yang terjadi sebelumnya merupakan hal wajar. Apalagi, harga minyak kelapa sawit juga sempat mendekati level 4.000 ringgit per ton beberapa pekan lalu.

"Level harga itu sudah mendekati kisaran tertinggi dalam 6 tahun. Roli harga biasanya berdampak pada kenaikan pasokan untuk menurunkan harga," jelasnya.

Wahyu mengatakan salah satu faktor koreksi harga CPO saat ini adalah gelombang paket stimulus dari Presiden AS Joe Biden. Dia menjelaskan prospek tambahan stimulus menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pasar. Pasalnya, stimulus yang deras dinilai akan menaikkan inflasi dan memicu koreksi harga komoditas, termasuk CPO.

Selain itu, pendiri Ellen May Institute (EMI) Ellen May mengatakan permintaan

komoditas CPO masih akan naik didorong oleh pemulihan ekonomi China yang dapat meningkatkan kebutuhan CPO untuk konsumsi.

"Dalam jangka pendek akan ada hari raya Imlek yang berpotensi mendorong permintaan CPO," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, dari sisi suplai dapat terganggu karena faktor cuaca. Dia memaparkan persediaan minyak kelapa sawit Malaysia kemungkinan turun 23% secara bulanan (mtm), sedangkan secara tahunan hingga 40% (yoy) menjadi 1,21 juta ton hingga akhir Desember 2020.

"Ini tingkat stok terendah sejak Juni 2007, sehingga berpotensi meningkatkan harga CPO. Hal ini karena sisi suplai yang tidak mampu mengimbangi permintaan yang meningkat," jelasnya.

Untuk itu, dia masih memproyeksikan bahwa masih akan ada potensi peningkatan permintaan untuk ke depannya, meskipun suplai masih terganggu.

SENTIMEN EROPA

Lebih jauh, Asean dan Uni Eropa (UE) memulai putaran pertama Asean - EU Joint Working Group on Vegetable Oil yang menyepakai standar keberlanjutan minyak nabati.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan bahwa pertemuan tersebut penting dalam menyepakati standar keberlanjutan seluruh minyak nabati dalam kerangka *sustainable development goals* (SDGs) memenuhi permintaan dunia.

Apalagi, Asean dan UE kerap menghadapi persaingan

dalam produksi minyak nabati. Asean, termasuk Indonesia, mengandalkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan.

"Semua punya standar masing-masing tapi dengan parameter dan platform yang sama dilakukan dengan *mutual recognitions* satu dengan lainnya," jelasnya.

Di sisi lain, UE mengedepankan penggunaan *npesed*, minyak kedelai, bunga matahari, hingga minyak zaitun. Eropa juga memiliki banyak pilihan minyak nabati tetapi kelapa sawit lebih sering menerima kampanye negatif.

UE juga dikenal kerap menghambat ekspor minyak sawit Indonesia termasuk dengan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap biodiesel sawit dari Indonesia 8,8% - 23,3% pada 2013.

Pada pengujung 2019, Eropa secara sepihak menetapkan tarif bea masuk sebesar 8% - 18% terhadap biodiesel Indonesia selama 5 tahun. Alasannya, perusahaan biodiesel asal Indonesia menerima subsidi secara berlebihan dari pemerintah.

Adapun terkait pertemuan tersebut, Mahendra Siregar menyebutkan sebagai mitra strategis antara Asean - UE, kerja sama tersebut menyediakan wadah untuk menyelesaikan perbedaan antara dua blok perdagangan.

"Sekaligus memberikan kesempatan untuk memanfaatkan sinergi yang ada dalam investasi dan perdagangan antara dua wilayah kami berdasarkan kepentingan bersama saling menghormati dan prinsip non-campur tangan," ujarnya. □



Kantong minyak sawit impor disimpan di gudang grosir minyak goreng di Mumbai, India.